

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2011. *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media.
- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media.
- Bergman, Paul. 2011. *Criminal Law Encyclopedia*. United States: Nolo.
- Effendi, A. Masyur dan Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Fyfe, Nicholas R. 2006. *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi terjemahan dari Protecting Intimidated Witnesses*. Jakarta: Elsam.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. Kamus Hukum.
- Hiariej, Oddy O.S. 2012. *Teori Hukum dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karya Anda. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Surabaya Indonesia.

Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *An Introduction to Indonesian Law*. Malang: Setara Press.

Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara Cetakan kedua puluh enam.

_____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Undang-Undang

The International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU Nomor 16 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 13 Tahun 2006.

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011.

C. Internet:

Ilman Hadi. Definisi Saksi Mahkota, hukum online,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota> (25 Mei 2012)